PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM

(Studi Kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

AHMAD KHOLIL LUBIS

NIM: 15 303 00003

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM

(Studi Kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Dalam Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

AHMAD KHOLIL LUBIS

NIM: 15 303 00003

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Drs. Kamaluddin, M.Ag	**Ali Amran Hasibuan, S.Ag., M.Si**
NIP.19651102 199103 1 001	**NIP.19760113 200901 1 005**

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Skripsi
an. **Ahmad Kholil Lubis**
lampiran : 6 (enam) Examplar

Padangsidimpuan, 22 Maret 2022
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
IAIN Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ahmad Kholil Lubis** yang berjudul **"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Pemberdayaan Islam (Studi Kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan)".**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP.19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II

Ali Amran Hasibuan, S.Ag., M.Si
NIP.19760113 200901 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	**: Ahmad Kholil Lubis**
Nim	**: 1530300003**
Fak/Prodi	**: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/PMI**
Judul Skripsi	**: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM"(Studi Kasus Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 22 Maret 2022
Pembuat Pernyataan

AHMAD KHOLIL LUBIS
NIM: 1530300003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: **AHMAD KHOLIL LUBIS**
Nim	: **15 303 00003**
Prodi	: Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-Exclusive) Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM"(Studi Kasus Di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : Maret 2022
Yang menyatakan,

AHMAD KHOLIL LUBIS
NIM. 15 303 00003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JalanTengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	***AHMAD KHOLIL LUBIS***
NIM	:	**15 303 00003**
Judul skripsi	:	**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris

Esli Zuraidah Siregar, M.Sos
NIP. 19920810 201903 2 013

Anggota

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Esli Zuraidah Siregar, M.Sos
NIP. 19920810 201903 2 013

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Siti Wahyuni Siregar, M. Pd. I
NIP. 19880709 201503 2 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	**: Padangsidimpuan**
Tanggal	**: 25 Maret 2022**
Pukul	**: 08.30 WIB s/d Selesai**
Hasil/Nilai	**: 75,75 (B)**
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	**: 3,36**
Predikat	**: Sangat Memuaskan**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan H.T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 662 /In.14/F.4c/PP.00.9/03/2022

Skripsi Berjudul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTA HOLBUNG KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN)

Ditulis oleh : AHMAD KHOLIL LUBIS
NIM : 15 303 00003
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, Maret 2022
Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama	:	AHMAD KHOLIL LUBIS
NIM	:	15 303 00003
Jurusan	:	Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul Skripsi	:	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Pemberdayaan Islam (Studi Kasus Di Desa Huta Holbung KEcamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan)

Peningkatan pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama Pemerintah Desa sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah Desa Huta Holbung berupaya untuk meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat namun tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya. Mampu atau tidak Pemerintah Desa Huta Holbung dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya tergantung pada pendekatan pemerintah kepada masyaratakatnya itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang nantinya akan dibahas di dalam penelitian ini dan seterusnya bagaimana peran pemerintah Desa Huta Holbung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari dari perspektif pemberdayaan Islam khususnya yang bertempat di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan?.

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemberdayaan ekonomi, upaya Pemerintah Desa dalam meningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kendala Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripif dengan bentuk studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non partisipan dan wawancara tidak terstruktur. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, menyusun, dan mengambil kesimpulan dari data observasi dan wawancara. Teknik penjamin keabsahan data dengan perpanjangan penelitian, ketekunan pengamatan, dan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Huta Holbung sudah menjalankan perannya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 2 yakni pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system peerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun belum sepenuhnya berjalan sesuai program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, Ditinjau Dari Perspektif Pemberdayaan Islam

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kearwah Nabi Muhammad Saw, karena safaat beliaulah yang kita harapkan di hari yang tak berguna harta dan jabatan, kecuali amal yang shaleh, dan Beliaulah yang telah menghalalkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman bagi ummatnya.

Alhamdulillah dengan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Perspeksitf Pemberdayaan Islam (Study kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan)."** dapat diselesaikan dengan baik.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan penulis dalam membahas masalah ini, dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak, akhir skripsi ini bisa diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini serta akan berakhirnya perkuliahan, maka ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.
2. Ibu Dr. Magdalena M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Bapak Dr. Mohd. Rafiq, S. Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak H. Agus Salim Lubis, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
3. Bapak Barkah Hadamean Harahap, S.Sos. M.I.Kom., selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak membantu penulis saat menjalani kuliah dan menyusun skripsi ini.
4. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan

pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H Armyn Hasibuan, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan prihal akademik sejak menjadi mahasiswi di IAIN Padangsidimpuan.
6. Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag. sebagai dosen pembimbing I, peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
7. Bapak Ali Amran Hasibuan, S.Ag., M.Si sebagai dosen pembimbing II, peneliti ucapkan banyak terima kasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
8. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum., sebagai Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang ada kaitannya dalam proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Serta seluruh Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan. Khususnya kepada Staf Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi yang telah membantu peneliti dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini.

10. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Imran Basir Lubis dan Ibunda tercinta Nurhasanah Pulungan yang telah membimbing dan selalu berdoa tiada henti hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
11. Bapak Anton Putra Bungsu Harahap Selaku kepala Desa Huta Holbung dan beserta jajarannya yang telah memberikan informasi dan data-data sebagai informasi penelitian penulis.
12. Kakanda Nurharisah Hasibuan S.Sos, yang telah memberikan dukungan, dorongan, perhatian dan sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
13. Sahabat Haholongan Siregar S. Sos yang memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi serta sumbangan pemikirannya untuk menyelesaikan penelitian ini.

14. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2015, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis serahkan segalanya serta panjatkan do'a dan semoga amal kebajikan mereka diterima di sisi-Nya, serta diberikan pahala yang berlimpah ganda sesuai dengan amal perbuatanyya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidimpuan, Mei 2022
Peneliti,

Ahmad Kholil Lubis
NIM: 15 303 00003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH
PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Istilah 4
C. Fokus Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 6
G. SistematikaPembahasan 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori 8
1. Pengertian Peran 8
2. Pengertian Pemerintah Desa 10
a. Pengertian Pemerintah 10
b. Peran Pemerintah Desa 12
c. Tugas Pemerintah Desa 13
3. Pengertian Desa 15
a. Pengertian Desa 15
b. Golongan-Golongan Desa 17
c. Fungsi Desa 21
4. Pengertian Ekonomi 21
a. Pengertian Ekonomi 21
5. Pengertian Pemberdayaan 24
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 24
b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 28
c. Tahapan Pemberdayaan 29
d. Konsep Pemberdayaan 31
e. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 32
6. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Islam 33
a. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Pandangan Islam 33
b. Prinsif- Prinsif Pemberdayaan Masyarakat Islam 35
c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam 37

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelititan 39
B. Jenis Penelitian..... 39
C. Informan Penelitian..... 40
D. Sumber Data Dalam Penelitian 40
E. Teknik Pengumpulan Data..... 41
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data..... 42
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Berdirinya Desa Huta Holbung 45
2. Kondisi Objektif Desa Huta Holbung 45
3. Struktur Kepemimpinan Desa Huta Holbung 47
4. Kondisi Ekonomi Masyarakat 48
B. Temuan Khusus
1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Desa Huta Holbung 50
2. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Islam 56
a. Pemberdayaan Yang Dilakukan Pemerintah Desa Huta Holbung..... 56
b. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Pemberdayaan Islam..... 59

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting terhadap masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan suasana yang mendorong masyarakat desa dalam memberikan kemampuan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia[1].

Tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, menciptakan suasana yang baik serta tercapainya segala urusan-urusan yang terjadi di masyarakat. Maka dengan itu pemerintah desa mempunyai peran yang menciptakan suasana yang baik terhadap masyarakat serta mengembangkan segala potensi-potensi dan mengembangkan informasi dan membimbing partisipasi terhadap masyarakat. Partisipasi terhadap masyarakat desa diwujutkan melalui pembinaan dan pemafaatan sumber daya alam yang ada, alhasil peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan sehingga keberkasilan program pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tidak selalu bergantung pada ketersediaan dana keuangan yang datang dari pemerintah pusat saja, sebaliknya pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta tanggapan terhadap pemberdayaan itu sendiri.

[1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 ayat 2

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan membutuhkan kepemimpinan lokal yang kompeten, berwibawa serta diterima oleh masyarakat. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran serta strategi untuk mengatur masyarakat desa demi mewujutkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkan peraturan-peraturan atau udang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya.[2]

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.[3] Pemberdayaan disebut juga memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat dengan bertanggung jawab demi memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.[4]

Sesuai dengan amanat undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa bahwa tujuan pemberdayaan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakant desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

---

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 ayat 3.

[3] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 24.

[4] *Ibid*, hlm. 25

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dalam membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan tercapainya antara keterkaitan desa dan kota.[5]

Secara umum masyarakat di desa Huta Holbung memiliki propesi yang berbeda diantaranya berpropesi sebagai petani, wiraswasta, dan PNS. Namun pada kesempatan kali ini, peneliti lebih terfokus kepada masyarakat yang berpropesi sebagai petani khususnya masyarakat desa Huta Holbung sebagai objek penelitian yang membahas bagaimana peran pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ditinjau dari perspektif pemberdayaan masyarakat Islam.

Mengingat propesi petani sebagai objek penelitian penulis dikarnakan petani adalah orang-orang yang pendapatannya masih di bawah rata-rata, maka apa saja peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Huta Holbung serta apakah pemerintah desa berperan atas kelangsungan hidup masyarkat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dikarnakan menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Bab V penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagian kedua Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi kepala desa bertugas menyeleggarakan pemerintahan desa, yakni melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[6]

Dari dasar hukum undang-undang di atas bahwa kepala desa sebagai pemimpin suatu desa mempunyai peran, serta tugas dan tanggung jawab besar

---

[5] Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 ayat 12.
[6] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Des*, Pasal 26 ayat 1.

terhadap melayani urusan pemerintahan, salah satunya iyalah meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga program pemerintah pusat akan pengentasan kemiskinan yang ada di desa terlaksana, dan demi mewujutkan kemaslahatan masyarakat, serta mewujutkan masyarakat desa yang terhindar dari belenggu-belenggu kemiskinan.

Berdasarkan studi pendahuluan dilapangan, penulis memberikan temuan awal berdasarkan wawancara bersama bapak Anton Putra Bungsu Harahap mengatakan:

> Peran pemerintah Desa Huta Holbung diharakan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan, hal ini dapat dilihat pemerintah desa dalam membantu petani untuk mendongkrak ekonomi salah satunya adalah pemberian pupuk, perbaikan jalan menuju ke sawah atau ladang, atau bahkan melalui program-program lainnya, yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat desa.[7]

Berdasarkan temuan di atas, penulis tertarik untuk membahas apakah peran pemerintah desa sepenuhnya terlaksana sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dengan itu penulis mengangkat judul **Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Perspeksitf Pemberdayaan Islam (Studi kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan)**

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menguraikan beberapa pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

---

[7] Anton Putra Bungsu Harahap, kepala Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli selatan, *Wawancara* tentang peran pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Tanggal 8 July 2021 di Desa Huta Holbung.

1. Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, sehingga kedudukan itu melakukan suatu tindakan atau gerakan sebuah perubahan dimana dari usaha tersebut diharapkan akan tercapainya suatu hasil yang diinginkan.
2. Pemerintah desa maksutnya dalam penelitian ini adalah struktur organisasi yang menjalankan roda pemerintahan di desa. Pemerintah Desa menurut undang-undang nomor 5 tahun 1979 disebutkan adalah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat berdaya dan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif Islam adalah keberuntungan, kesuksesan dalam meraih kenikmatan yang berkaitan dengan kehidupan dunia serta akhiratnya. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini yakni ditandai keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasya dengan baik sehingga memberikan respon positif terhadap orang-orang yang diberdayakannya, sehingga nantinya orang-orang tersebut dapat terlepas dari belenggu-belenggu kemiskinan serta menjadikan tarap hidupnya berada ditempat yang sebaik-baiknya, dalam arti bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat.

C. Fokus Masalah

Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah, ‘**Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Perspeksif Pemberdayaan Islam (Studi kasus di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanulis Selatan).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapanuli Selatan menurut perspektif pemberdayaan Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dalam perspektif pemberdayaan Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan kepada peneliti, khususnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat ditinnjau dari peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Sebagai bahan perbandingan dalam membahasan pokok masalah yang sama bagi peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menggambarkan isi maksud dari penelitian, batasan masalah bertujuan untuk membatasi permasalahan sehingga masalah terfokus pada tujuan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya batasan istilah, selanjutnya fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan.

Bab II. Menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi pengertian dan teori yang membahas tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif pemberdayaan Islam.

Bab III. Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan data.

Bab IV. Menjelaskan hasil penelitian yang meliputi temuan umum dan khusus yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Peran

Peran secara etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.[8] Secara terminologi beberapa pendapat mengutarakan pengertian peran salah satunya peran menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.[9] Dari definisi peran menurut Soerjono Soekanto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseoarang yang berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan perannya dengan baik dan benar.

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

---

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20

[9] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm. 212-213.

b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang berguna bagi kelompok itu sendiri.
c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain sehingga berjalan dengan baik.[10]

Menurut Biddle dan Thommas Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thommas juga memberikan istilah dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

a. Orang-orang yang mengambil bagian.
b. Prilaku yang muncul dalam interaksi.
c. Kedudukan orang-orang dalam prilaku.
d. Kaitan orang dengan prilaku.[11]

Menurut para ahli peran secara umum adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedukannya di dalam sebuah sistem yang iya kerjakan. Peran secara khusus adalah melakukan suatu tindakan yang diharapkan dari seseorang terhadap situasi tertentu. Maksut demikian melakukan sesuatu yang dijalankan seseorang sebagai sebuah aktivitas yang mempunyai sebuah kedudukan atau status sosial di dalam sebuah organisasi. Peran diartikan juga sebagai perangkat

[10] Syaron M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota dan Desa* , Jurnal Adminitstrasi Publik. Volume. 04, No. 048.
[11] Soerjono Soekanto *Ibid.*, hlm. 214.

tingkat laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas kata peran menurut disiplin ilmu sosiologi adalah membawakan sebuah pola tingkah laku yang dimiliki pemerintah desa (kepala desa) yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam kajian peran menurut sosiologi tindakan seseorang itu menghasilkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah lembaga atau organisasi. Peran dalam penelitian ini suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengank fungsinya di dalam organisasi atau yang memegang komando di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing masyarakat sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

2. Pengertian Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintah secara etimologi berasal dari kata “perintah”, berarti suatu perkataan yang bermaksut untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. Adapun pemerintah secara terminologi dapat diartikan sebagai sebuah sistem dalam menjalankan wewenang dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara **.** Hubungan pemerintah dan desa yang dimaksutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.[12]

Pemerintah yang dimaksutkan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yakni kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[13] Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa Bab V penyelenggaraan pemerintahan desa bagian kedua pasal 26 ayat 1 yang berbunyi kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa di dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.[14]

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran dan strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di desa demi mewujutkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diwujutkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur mereka, sehingga roda pemerintahan berjalan secara optimal. Pemerintah desa yaitu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan lainnya.

---

[12] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 ayat 2
[13] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 ayat 3
[14] Undang-Undang Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005*Tentang Desa*, Pasal 1 ayat 2

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, yang dimaksutkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 26 ayat 1 di atas maka pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan-urusan di dalam pemerintahan desa yakni sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
2) Melaksanakan pembangunan terhadap desa.
3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakan desa.
4) Dan memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.[15]

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa dalam sebagian wilayah Indonesia yang berada di bawah naungan kecamatan ataupun kota, yang di pimpin oleh seorang kepala desa merupakan dari penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa. Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa musti cakap akan pengentasan kemiskinan di dalam sebuah kehidupan masyarakat, karena hal ini menyangkut akan kelangsungan hidup sebuah masyarakat desa.

b. Peran Pemerintah Desa

Peneliti sudah membahas sedikit di atas mengenai pengertian peran yang dimaksut merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseoarang yang berfungsi sebagai tugas wajib yang seharusnya dilakukan secara spontan agar bisa melaksanakan perannya

[15] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 26 ayar 1

dengan baik dan benar. Peran pemerintah desa (kepala desa), beserta jajarannya secara sederhana dapat di pahamai sebagai tidakan yang dapat dilakukan seseorang pada suatu tempat dan peristiwa yang dihadapi tertentu, serta dijalankan sesuai dengan sistem masing-masing dan bertanggung jawab, karena peran pemerintah ini yang nantinnya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menggapai suatu yang di selenggarakan oleh pemeritah pusat.[16] Adapun tolak ukur peran bisa dicakup dengan 3 (tiga) hal, yakni:

1) Segala norma-norma yang di sandingkan dengan kedudukan serta fungsi dalam masyarakat, artinya peran meliputi serangkaian peraturan yang berlaku di dalam masyarakat sehingga dapat membimbing kehidupan bermasyarakat.
2) Peran yang dimaksut dengan sebuah konsep yang terkontrol atas tata cara seseorang dapat melakukan peran dengan baik.
3) Sebahagian perilaku yang baik dan terstruktur di dalam melaksanakan peran dengan baik terhadap masyarakat.[17]

c. Tugas Pemerintah Desa

Pengertian tugas secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan seseorang dan sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai pelaksana. Dalam hal ini pemerintah desa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pemerintahan pusat, dikarenakan tugas dan fungsi sebagai salah satu yang ditunjuk untuk

[16] Syaron dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Administrasi Publik, Volume. 04. Nomor. 048 (diakses pada 8 Maret 2022 pukul 21.02 WIB), hlm. 2.
[17] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 244.

diberikan tugas oleh pemerintah merupakan hal tidak dapat terlepas dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin di dalam masyarakat, yakni kepala desa, dan beserta staf jajarannya.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dpasal 26 tentang desa menyebutkan bahwa kewenangan atau tugas pemerintah desa diantara:

1) Penyelenggaraan pemerintah desa,
2) Pelaksanaan pembangunan desa,
3) Pembinaan kemasyarakatan desa,
4) Pemberberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.[18]

Dalam menjalankan misi pemerintahan desa, tugas pemerintah desa diantaranya adalah: tugas bidang pemerintahan, tugas bidang pelayanan kepada masyarakat, dan tugas dibidang pemberdayaan. Berdasarkan kedudukannya, tugas dan wewenang dari pemerintah desa merujuk kepada peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Kepala desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan dan menjalankan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa. Adapun wewenang kepala desa dalam pemerintah desa mencakup:

a) Penyelenggara pemerintahan desa, dan menetapkan peraturan,
b) Mengangkat, memberhentikan perangkat desa serta mengelola keuangan aset desa,

[18] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Kewenangan Desa*, Pasal 18 dan 19 .

c) Membina kehidupan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat,
d) Membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat,
e) Mengembangkan sumber pendapatan, sosial budaya masyarakat desa, dan memanfaatkan teknologi tepat guna,
f) Mengelola dana bantuan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
g) Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.[19]

2) Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas dalam membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang di berikan kepala desa.

3) Badan Permusayawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa bertugas sebagai pembahas rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepala desa. Berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, dan pengawas dari kinerja kepala desa. Adapun keanggotaan badan permusyawaratan desa terdiri dari perwakilan masyarakat yang diangkat secara demokratis dan memiliki masa jabatan[20].

3. Pengertia Desa

a. Pengertian Desa

Secara etimologi desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu swadesi, yang memiliki pengertian sebagai asal, tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.[21] Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri

[19] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 26 ayar 1
[20] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 26 ayar 3.
[21] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), hlm, 2.

berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa menurut para ahli, widjaja mengatakan desa adalah salah satu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.[22] Pengertian desa dijelaskan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota.[23]

Kemudian pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur serta mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan hak tradisional yang lebih diakui oleh pemerintahan pusat.[24]

Dengan demekian dapat dipahami bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengatur wilayahnya sendiri secara otonomi dan memiliki hak untuk

---

[22] Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 239.

[23] Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Pemerintahan Desa*, Pasal 2 ayat 1.

[24] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* , Pasal ayat 1

diistimewakan, dihargai, dan dilestarikan serta dilindungi haknya oleh pemerintah pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945.

b. Golongan-Golongan Desa

Berdasarkan intruksi mentri dalam negeri nomor 11 tahun 1972 tentang pelaksanaan klarifikasi dan tipologi desa di Indonesia digolongkan dalam tiga tingkatan yakni: [25]

1) Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan terdisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Desa ini biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim serta sangat tergantung pada alam. Secara umum ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

a) Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (menangkap ikan, bercocok tanam secara tradisional).
b) Produksi desa sangat rendah dibawah 50 juta rupiah per tahun.
c) Adat istiadat masih mengikat kuat.
d) Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.
e) Prasarana masih sangat kurang.
f) Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik.

[25] Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 230

g) Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.[26]

Dari penjelasan desa diatas desa swadaya merupakan kategori desa terbekakang, desa terbelakang maksutnya desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

2) Desa Swakarsa

Desa Swakarsa mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa swakarsa sebagai berikut:

a) Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
b) Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah per tahun.
c) Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang hidup.

[26] *Ibid*, Nurman, hlm. 231

d) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30- 60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.

e) Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.

f) Swadaya masyarakat dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

Dari penjelasan diatas Desa Swakarsa merupakan desa sedang berkembang maksutnya desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.[27]

3) Desa Swasembada

Desa Swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Ciri-ciri desa swasembada sebagai berikut:

[27] *Ibid*, Nurman, hlm. 231-232

a) Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
b) Produksi desa tinggi dengan penghasilan usaha diatas 100 juta per tahun.
c) Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
d) Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
e) Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.
f) Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik.
g) Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

Dari penjelasan diatas Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.[28]

[28] *Ibid*, Nurman, hlm. 232.

c. Fungsi Desa

1) Desa sebagai sumber pangan maksutnya desa merupakan daerah pendukung berfungsi menyediakan kebutuhan pokok kota.
2) Desa sebagai sumber ekonomi dan sumber tenaga kerja (man power) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Jika kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan melalui usah masyarakat maka perekonomian desa dapat maju dan berkembang.
3) Desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota fungsi desa sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi membuktikan adanya hubungan timbal balik antara kota dan desa. Desa dapat menyediakan bahan mentah, bahan pengan, dan sumber daya manusia bagi kota. Sebaliknya, desa semakin maju secara ekonomi.[29]

4. Pengetian Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *economy* sementara kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah surat usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya dengan berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha keinginan masing-masing.

[29] *Ibid*, Nurman, hlm. 233.

Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Dalam perekonomian yang berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi, peran masyarakat sangat besar. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasan, adat-istiadat, hokum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama.[30] Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa misi ekonomi kerakyatan adalah penyediaan lapangan kerja, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga Negara, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas pemerintah desa. Peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan disetiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang.

---

[30] Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Prekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 138.

Dengan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mendorong berkembang usaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan memberikan bantuan modal dengan bunga rendah, memberikan kesempatan dan kemudahan mengembangkan usaha dan berusaha, serta membekali pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan, maka diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan peningkatan perekonomian berdasarkan karakteristik potensi, geografis dan kebutuhan daerah, maka strategi kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan akses untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta menigkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah yang saling mendukung.
2) Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum tergali di daerah tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.
3) Menigkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di daerah yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan dalam kerangka perekonomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi geografis dan kebutuhan daerah.
4) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komperatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan

potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan lokasi geografis.[31]

5. Pengertian Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu.[32] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayan bersal dari kata daya, yang mempunyai beberapa makna diantaranya: (1) kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; (2) kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya).[33]

Pemberdayaan secara terminologi adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki oleh seseorang agar mendorong dan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya terlihat jelas. Pemberdayaan juga diartikan memberikan daya atau sebuah kekuatan yang belum diasah atau masih bersifat abstrak sehingga orang yang mendapatkan daya dapat berdaya sesuai dengan keinginannya masing-masing.[34] Pemberdayaan menurut kacamata sosial proses memperbaiki situasi dan kondisi seseorang agar dia dapat diandalkan, serta berdaya di berbagai kalangan masyarakat sosial tentunya.

---

[31] Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 126.

[32] W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, cet VIII,1996), hlm.233

[33] *Ibid.*, hlm 234

[34] Saifuddin Yunus dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Banda: Aceh: Bandar Publishing, 2017) hlm., 1

Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menigkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin sehingga mereka dapat terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga berupaya membangun kemampuan yang masih terpendam serta memberikan motivasi dan membangkitkan potensi yang mereka menjadi kekuatan tindakan yang nyata.[35]

Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertahap dan terus menerus karena filosofi pemberdayaan masyarakat adalah bekerja bersama serta memberikan bantuan agar harkat dan martabat mereka terangkat. Maksudnya memberikan kekuatan kepada mereka agar dapat berkembang secara mandiri.

Menurut Jim Ife pengertian pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif yaitu:

1) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif plularis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara efektif dengan kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran menggunakan keahlian dalam melobi menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana cara bekerja menurut system yang ada.

[35] *Ibid*., hlm. 3

2) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain. Upaya ini dilakuakn mengingat masyarakat tak berdaya karena adanya power dan control yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.
3) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk struktural deliminasi. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik karena alasan kelas sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.
4) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-struktural adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa

munculnya ketidak berdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (powerless).[36]

Menurut Sri Handini menulis di dalam buku yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat (Mas'oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.[37] Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

1) Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
2) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.[38]

Berdasarkan beberapa pengertian yang diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang

[36] Op Cit., Zubaedi, hlm. 25-27
[37] Sri Handini, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Msc, 2019), hlm. 8
[38] *Ibid*., Sri Handini, hlm. 8

dihadapi dan sekaligus memilih alternatif yang pas secara optimal sehingga masyarakat khususnya golongan miskin sehingga mereka terlepas dari belenggu kemiskinan mereka.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial,[39] maksutnya dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat, melalui upaya saling membantu dan belajar agar tercapainya tujuan yang besar. Serta mampu membuat masyarakat terhindar dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidak berdayaan mereka. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, kebutuhan dasar itu mencakup, pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Keterbelakangan dimaksut produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Dengan kata lain kemandirian itu meliputi kemandirian berfikir, guna agar masyarakat dikatakan berdaya karena mengandalkan pola pikir yang baik demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat

[39] *Op. Cit.* Zubaedi, hlm. 21

(*community development*), yaitu proses dimana usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.[40]

c. Tahapan pemberdayaan

Menurut Sulistiani proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2) Tahap trasformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3) Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.[41]

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, trasformasi, dan peningkatan intelektual, masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih

[40] *Op. Cit.* Saifuddin Yunus dkk, hlm. 5

[41] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraaan dan Model-Model Pemberdayaan.*(Jogjakarta: Gava Media, 2004) hlm. 83-84

baik, mensejahterakan adalah kewajiban bersama dalam lingkup keluarga dan negara.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan, beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk memberdayakan mereka.

1) Kekuatan atas pilihan pribadi, upaya pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pillihan pribadi guna untuk hidup lebih baik.
2) Kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri, pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhan sendiri.
3) Kekuatan dalam kebebasan berekspresi, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya politik.
4) Kekuatan kelembagaan, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, system kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5) Kekuatan sumber daya ekonomi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.

6) Kekuatan dalam kebebasan reproduksi, pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.[42]

d. Konsep Pemberdayaan

Konsep merupakan rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa nyata. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan perkataan lain memberdayakan adalah membantu dan memandirikan masyarakat.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan dan Pranarka, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri.[43] Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari berbagai upaya pembangunan sendiri.

---

[42] *Op. Cit.* Zubaedi, hlm. 27

[43] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 47.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut :

Pertama, upaya itu harus punya tujuan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan masyarakat sebagai sasarannya. Ini bertujuan, program bisa berjalan secara efektif sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

Ketiga, pendekatan kelompok. Pendekatan ini dilakukan karena masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya secara sendiri-sendiri. Karena, pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efesien.[44]

e. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian indakator secara sederhana ialah masyarakat dikatakan berdaya berdasarkan sebagai berikut:

1) Mamapu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga.
2) Mampu meningkatkan pendapatan ekonomi.
3) Mampu meningkatkan taraf kehidupan yang sejahtera.[45]

[44] *Ibid*, hlm.,59.
[45] *Ibid*, hlm.,59.

6. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Islam

a. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Pandangan Islam

Pemberdayaan menurut perspektif islam tentunya tidak dapat dilepaskan dengan menggunakan pedoman ummat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, disamping itu Al-Qur'an secara tegas menyebutkan bahwa untuk mencapai kebahagian itu musti mengikuti segala sesuatu yang menjadi kewajiban yang diperintahnya serta menjauhi segala larangannya, kenapa demikian agar nantinya keberdayaan seseorang itu dapat kita ukur berdasarkan ketaatan seseorang kepada sang pencipta, itu yang pertama menurut pandangan Islam, selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalu peran pemerintah menurut kaca mata perspektif Islam ialah dalam Islam telah menetapkan beberapa metode yang harus masyarakat musti laksanakan segala sesuatu yang datang dari pemekiran-pemikiran pemerintah, karena di dalam ajaran agama Islam merupakan menekankan pada kepedulian sosial, karena pemberian daya merupakan misi ajaran agama Islam juga..[46]

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikaan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

---

[46] Titis Istikomah, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Enterpreneurship Capacity Building, Dalam Perspetif Ekonomi Islam*", (Jurnal Adminitstrasi Publik. Volume. 05, No. 090 IAIN Lampung) hlm. 45.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ
إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnyaaku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Islam memandang masyararakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung antar individu, masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahim antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama yaitu, prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun,* dan prinsip persamaan derajat.[47]

Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

[47] Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 IAIN Salatiga), hlm. 32-34.

Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha, didalam sejarah Rasul Muhammad SAW, pernah disebutkan, bahwa *Muhammad SAW Is A Man Power* For *Economi*, makna yang dapat kita ambil adalah bahwa Rasul kita adalah seseorang yang pernah mengambil jalan ekonomi untuk mengedepankan Ummatnya.

b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat dibangun atas prinsip-prinsip yang sesuai ajarannya. Setidaknya terdapat tiga prinsip yang mesti dilakukan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pertama, prinsip kepedulian. Prinsip ini sejatinya merupakan bagian penting dari ajaran Islam, bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk konsep tauhid dari ajaran Islam. Tauhid yang merupakan ajaran inti dalam Islam tidak sekedar bermakna pengakuan atas keesaan Allah. Tetapi mesti bermuara pada bentuk aksi dalam wilayah kemanusiaan. Aksi ini dapat dilakukan dengan membangun kepedulian kepada sesama sebagai bagian dari prinsip pemberdayaan.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memliki

paradigma yang holistik dan strategis.[48] Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikaan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Kedua, prinsip keadilan. Penegakkan keadilan merupakan inti misi sosial para nabi, sejak Adam as. hingga Muhammad SAW. Keadilan dalam kehidupan akan berjalan dengan baik jika diiringi dengan aktualisasi nyata. Menegakkan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Sebagai menegakkan keadilan merupakan bagian dari hukum yang bersifat objektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia, tetapi merupakan kemauan Allah SWT. [49]

Ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini didasarkan pada semangat memanusiaan. Dalam prinsip ini semua manusia sama, sehingga setiap manusia dilarang untuk mengganggap diri paling berdaya. Justru keberdayaan yang melekat pada diri manusia yang berdaya mesti diaktualisasikan dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat lemah. Semangat memanusiakan manusia merupakan semangat yang dapat melahirkan kesadaran jika setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain.

---

[48] Mutthoriq dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, (Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, No 3, IAIN Lampung), hlm 426-432.

[49] Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina,2008), hlm. 41-42.

Firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ﴿١١﴾

Artinya: "Sesunggunya Allah tidak merobah keadaan suatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"[50]

Berdasarkan ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan megubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kaitan ayat ini dengan pemberdayaan adalah setiap individu diajarkan untuk mandiri dan berusaha dalam memenuhi kebutuhannya sebab jika kita tidak berusaha maka Allah swt tidak akan membantu setiap hamba yang bermalas-malasan dan hanya berpangku tangan menerima segalanya.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan khusus dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin hidup dalam kondisi tidak sejahtera. Islam adalah agama yang menginginkan umatnya hidup dalam kesejahteraan, karena itu adalah awal dari lahirnya kemashlahatan.

---

[50] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (PTSyamil Cipta Media, Bandung, 2005), hlm. 368.

Dari ayat di atas menyebutkan bahwa pemerintah ikutserta selaku pentingnya dalam pemberdayaan masyarakat dalam Islam, perlunya di terapkan sistem partisipasi dalam masyarakat dengan guna menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dalam gerakan perubahan, dengan hal tersebut maka dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari dua kategori, yaitu: terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu atau masyarakat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, serta terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan individu atau masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial, melainkan juga sistem ekonomi semata. Selain itu, tanggung jawab dan melakukan pembangunan yang seimbang bagi masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu keseimbangan antara duniawi dan akhirat.[51]

[51] Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 182-183.

BA B III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi berlangsung untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian dimualai dari bulan September 2021 sampai dengan Maret 2022. Adapun alasan penulis dalam memilih sebagai berikut:

1. Dikarenakan peniliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya desa Huta Holbung.
2. Penulis optimis bahwa penelitin ini dapat diselesaikan, hal ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan, serta keberadaan tempat penelitian berada di desa yang tidak begitu jauh, walaupun beberapa kilometer dari tempat tinggal peneliti. Selain itu judul yang penulis ajukan telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field* Research), yang bersyifat deskriptif yaitu penelitian terhadap realitas/fenomena tertentu dan menggambarkan secara deskriptif guna melahirkan teori atau proposisi tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif biasanya menjadi gejala sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan

gejala alam sebagai objek-subyek kajiannya. Tuntutan penelitian deskriptif kualitatif hanya sebatas untuk mendeskripsikan data secara aktual, akurat dan sistematis.[52]

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh si peneliti. Jadi dalam penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa ditinjau dari Perspeksitf Pemberdayaan Islam (Study kasus di Desa Huta Holbung Kec. Angkola Muara Tais Kab. Tapanulis Selatan).

Adapun dalam hal ini unit analisis yang dilaksanakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu suatu tekhnik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dari penulis. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan penelitian dengan pertimbangan khusus dari penulis sehingga layak dijadikan sebagai informan dalam suatu penelitian.

D. Sumber Data Dalam Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok tentunya kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa (BPD),

[52] Ichwansyah Tampubolon, *Metodologi Studi Keislaman*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hlm. 220

Hatabongan, Alim Ulama yang berada di desa khususnya Huta Holbung. dan yang terpenting masyarakat yang ekonominya rendah berjumlah 10 keluarga.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder bisa disebut juga sebagai data pendukung, data yang peneliti dapatkan berasal dari buku, internet, majalah, arsip atau jurnal ilmiah, dan juga beberapa data dari masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, baik dari data primer maupun sekunder digunakan beberapa teknik antara lain:

1. Obseravasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, yaitu mengamati dan mendengar, memahami, mencari jawapan, mencari bukti, terhadap penomena dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan analisis.[53] Observasi yang dimaksut dalam penelitian ini adalah observasi awal mengenai pengentasan kemiskinan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara berdialog kepada salah satu masyarakat yang menjadi informan atau

[53] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 62.

responden.[54] Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti sendiri. Wawancara dalam penelitian ini wawancara terhadap 10 keluarga khususnya masyarakat desa Huta Holbung secara terpimpin yaitu pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Tujuannya agar informasi yang didapatkan tergali dengan sempurna.[55]

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, photo-photo, agenda, dan sebagainya yang menjadi dokumentasi di lapangan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisi data adalah kegiatan yang menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis Data adalah proses menyusun dan mengolah data agar dapat ditulis dengan baik. data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan. [56]

---

[54] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pusataka Setia, 2009), hlm. 131.

[55] Wardi Bachtiar, *Metodologi Peneitian Ilmu Dakwah*. Cet ke 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm .72

[56] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), hlm. 135.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden, peneliti dilapangan selanjutnya menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang dilapangan terjadi ketidak sesuaian jawapan, maka peneliti mempertimbangkan kembali hasil observasi dan mewawancarai kembali kepada yang bersangkutan. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir untuk di tulis kembali.

Keabsahan Data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Ahmad Nizar yang dikutip dalam buku metodologi penelitian yang memberikan empat standar untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:[57]

1. Kredibilitas *(Credibility)*

   Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian ini dengan melakukan penelitian secara tekun dan akurat, dengan ketelitian dan kejelian, sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas dan jelas.

2. Keteralihan (*Transferability*)

   Keteralihan adalah suatu hasil penelitian yang dapat diterapkan kepada pembaca agar dapat dimengerti.

[57] *Ibid.*, hlm 154-155

3. Keteguhan (*Dependability*)

Keteguhan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan keabsahan data.

4. Ketegasan (*Comfirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang dapat dipastikan keabsahannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Cara ini dilakukan dengan mengedit semua data yang diperoleh dilapangan untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diproleh.[58] Untuk memperoleh keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi (metode wawancara, observasi dan survei).

[58] Op Cit, Wardi Bachthiar, hlm. 34

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Desa Huta Holbung

Desa Huta Holbung adalah salah satu desa yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Utara Kecamatan Angkola Muaratais, asal nama Desa Huta Holbung menurut cerita awalnya Desa/Huta yang berada di kaki gunung dan merupakan Huta yang sangat rawan akan banjir, maka oleh karena itu desa Huta Holbung yang artinya desa cekung seperti kuali, yang pendirinya adalah seorang Datu/Dukun/yang disebut yang mempunya pengetahuan layak orang pintar (hal-hal mistis) disebutkan dalam bahasa Mandailing, yang ada di desa tersebut yang bermarga Harahap dengan dasar terbentuknya berlandaskan hokum adat atau budaya, pada tahun 1817.[59]

2. Kondisi Objektif Desa Huta Holbung

a. Geografis Desa Huta Holbung

Letak wilayah desa Huta Holbung secara gografis berada di sebelah Utara desa Sipangko, sebelah Selatan Kelurahan Bintuju, sebelah Barat Hutan Rakyat, dan sebelah Timur desa Pasir Matogu. Open posisi dari pusat Kota Padang Sidimpuan desa Huta Holbung mengarah ke Jalan Lintas Trans Sumatera Bukittinggi-Padang, yakni

[59] *Observasi*, Letak Geografis Desa Huta Holbung, 15 Maret 2022 pukul 10.10 WIB.

Padangsidimpuan, Sihitang, Pijorkoling, Manunggang, Manegen, Huta Tonga, Sipangko, Selanjutnya Huta Holbung.[60]

Jika dilihat menurut kondisi iklim di daerah Desa Huta Holbung memiliki iklim yang sama sebagaimana di berbagai tempat lainnya, yakni musim panas dan musim hujan. Adapaun batas wilayah menurut Monografi Desa Huta Holbung sesuai dengan data Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sipangko.
2) Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Bintuju.
3) Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Rakyat.
4) Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pasir Matogu.

b. Kondisi Demografis

Desa Huta Holbung merupakan desa yang berada di daerah kaki gunung dataran rendah yang memiliki perkebunan sawah yang begitu luas dan perkebunan karet, dikarnakan desa Huta Holbung termasuk mempunya luas sawah +-3/4 Hektar dan ladang Karet +-3 Hektar, dan memiliki hutan yang belum dikelola oleh masyarakat setempat. Lokasi Desa Huta Holbung berada pada tempat yang strategis, dikarnakan lokasinya yang bertepatan Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa kecamatan dan kabupaten antara Padangsidimpuan-Medan dan Bukittinggi-Padang.[61]

---

[60] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Monografi Desa, 15 Maret 2022 pukul 10.20 WIB.

[61] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Monografi Desa, 15 Maret 2022 pukul 10.40 WIB.

Masyarakat desa Huta Holbung dilihat dari segi mata pencaharian masyarakat jika di rata-ratakan 90% secara keseluruhan mereka adalah masyarakat yang berpropesi sebagai petani yakni di sawah dan kebun karet, dalam arti di sawah adalah menanam padi dan di kebun sebagai menderes karet. Pada kesempatan kali ini peneliti mempokoskun untuk meneliti masyarakat yang berpropesi sebagai petani kebun karet .Dari sana kita ketahui bahwa propesi tersebutlah yang paling dominan yang dimiliki khusus masyarakat yang ada di Desa Huta Holbung. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Desa Huta Holbung memiliki penduduk jiwa sebanyak 1.207 jiwa yang terdiri lebih kurang 300 Kepala Keluarga.[62] Untuk lebih rinci, penulis memberikan tabel sebagaimana berikut:[63]

Tabel, 4.1.
Jumlah Penduduk Desa Huta Holbung
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Total	%
1.	Laki-Laki	606 Orang	51
2.	Perempuan	601 Orang	49
Jumlah Total		**1207 Orang**	

Sumber: Data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Desa Huta Holbung Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

3. Struktur Kepemimpinan Desa Huta Holbung

Adapun struktur kepemimpinan Pemerintah Desa Huta Holbung dapat dipahami sebagai berikut dalam gambar dibawah ini.[64]

---

[62] Dinas *Kependudukan* dan Pencatatan Sipil, *Data Agregat Kependudukan Huta Holbung Kecamatan Angkola MuaraTais* , Kabupaten Tapanuli Selatan, 2022.

[63] Anton Putra *Bungsu* Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Monografi Desa, 15 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

[64] *Observasi*, Struktur Pemerintah Desa Huta Holbung, 15 Maret 2022 pukul 11.00 WIB.

Tabel, 4.2.
Struktur Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais
Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun Jabatan 2022

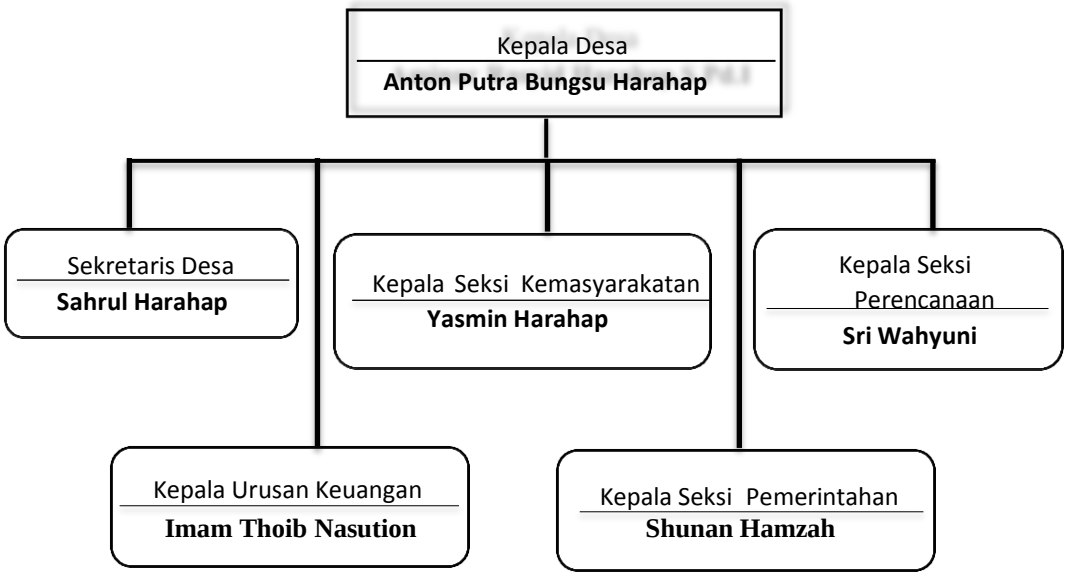

Sumber: Data Agrerat Kepemimpinan Desa Huta Holbung Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi keadaan ekonomi masyarakat desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat ini merupakan kondisi yang lumayan dalam arti keadaan ekonomi masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari yakni sandang, pangan, dan papan, dibandingkan 2 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020 yang lewat seluruh dunia mengalami yang namanya wabah Copid 19, disebabkan hal yang demikian kondisi pada saat 2 tahun terakhir khususnya desa Huta Holbung sangat memprihatinkan khusunya dalam hal kondisi ekonomi Desa Huta Holbung karena bagi para petani khusunya untuk membutuhi kebutuhan sehari-hari mereka tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, contoh besarnya harga kiloan untuk harga karet begitu mencekit, disamping

pengepulnya hanya satu orang saja yang ada di desa tersebut membuat perbandingan harga tidak ada.[65]

Beralih ke Peran Pemerintah Desa, Kebijakan yang dilakukan 2 tahun terakhir khusunya masyarakat Desa Huta Holbung bahwa, mengambil kebijakan diantaranya dana desa yaitu salah satunya BLT yang turun dari pemerintah pusat itu di alokasikan kepada Dana Copid 19 berlandaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam artian apabila dia termasuk dalam kategori miskin garis bawah tidak bekerja/lansia maka dana dari dana desa itu di bagi ratakan berdasarkan observasi yang dilakukan bagi siapa saja yang layak mendapat sehingga dana desa tersebut di sama ratakan berbentuk dana BLT atau di sebut dengan Bantuan Langsung Tunai.[66]

Pada dasarnya keadaan ekonomi masyarakat khususnya desa Huta Holbung menurut kepala desa termasuk masyarakat yang layak dibantu, bertepatan pula dengan wabah yang terjadi 2 tahun terakhir tepatnya 2020, maka inisiatif dari Kepala Desa melakukan hal yang demikian.[67]

B. Temuan Khusus

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti dan dikumpulka berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari Perspektif Pemberdayaan

---

[65] Yasmin Harahap, Kepala Seksi Kemasyarakatan desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 10:00 WIB.

[66] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

[67] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 11.30 WIB.

Islam, untuk lebih jelasnya dapat dipahami sesuai dengan penjelasan yang peneliti uraikan di bawah ini.

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Desa Huta Holbung

Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan melihat kondisi masyarakat desa yang tenang dan tentram ditengah kondisi ekonomi mereka yang serba kekurangan serta dengan penghasilan yang masih di bawah rata-rata. Kenyataan yang peneliti temui adalah, penduduk desa khususnya Huta Holbung di tengah kondisi yang ekonominya rendah mereka tidak akan lupa akan bahu membahu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, salah satu contoh ketika salah satu masyarakat yang ekonominya rendah menghadapi satu musibah, pasti masyarakat yang lainnya akan memberikan pertolongan, antara satu sama lain.[68]

Di samping kondisi ekonomi yang masih serba kekurangan, masyarakat Desa khususnya Huta Holbung, tetap ramah antara satu dengan yang lainnya, rasa kekeluargaan yang mereka miliki itu menciptakan suatu keharmonisan di lingkungan mereka. Waktu berpapasan mereka tidak akan lupa menanyakan hendak pergi kemana, begitulah mereka menyapa antara satu dengan yang lainnya.

Desa Huta Holbung sendiri merupakan desa yang strukturnya masyarakatnya yang rukun, contoh kecilnya masyarakat satu dengan lainnya sangat begitu antusias tentang rasa tolong menolong antar sesama begitu tinggi, hal ini dirasakan oleh peneliti sendiri sembari peneliti sedang

[68] Budiman Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* Tanggal, 14 Maret 2022.

mewawancarai salah satu masyarakat miskin di Desa Huta Holbung informan tadi sangat ramah serta menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan baik. Padahal pada waktu itu bertepatan masyarakat desa tadi hendak pergi ke lading untuk menderes kebun karetnya, hal itu malahan masyarakat tadi memberikan senyuman yang ramah serta tidak menolak wawancara yang diberikan oleh peneliti sendiri.[69]

Desa Huta Holbung merupakan satu Desa yang ada di wilayah Tapanuli bagian Selatan, yang mayoritas kondisi keaadaan ekonomi masyarakat penduduk Desa Huta Holbung pada umumnya yang bermata pencaharian sebagai petani sawah, dan petani penderes kebun karet, dan pokus peneliti kepada petani kebun karet sebagai objek penelitian dikarnakan petani sawah hanya sekali 3 bulan agar padinya menguning dan panen. Sebahagian dari mereka bermata pencaharian wiraswasta diantaranya, supir mobil, bengkel, dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi masyarakat desa khususnya Huta Holbung yang memiliki 2 musim panen bahkan 3 dalam jangka setahun yakni tanaman padi, dan untuk keseharian untuk menghidpi kebutuhan sehari-hari khususnya masyarakat Desa Huta Holbung mereka mencari nafkah dengan menderes kebut karet maka peneliti pokuskan kepada petani kebun karet saja.[70]

Profesi sebagai petani sawah, dan petani kebun karet merupakan profesi terbanyak yang dimiliki oleh mayoritas penduduk desa Huta Holbung, sehingga sektor pertanian sangat menentukan tingkat pendapatan

[69] Budiman Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* Tanggal, 14 Maret 2022.
[70] Taufik Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* Tanggal, 14 Maret 2022.

dan tekanan terhadap pendapatan ekonomi mereka, melihat hal yang demikian kondisi keadaaan ekonomi yang dialami keluarga petani miskin menyebabkan pilihan untuk bertahan hidup demi memenuhi kebutuhan mereka bergantung kepada ladang yang dikelola.

Pekerja yang berprofesi sebagai penderes karet yang sifatnya berkala memungkinkan masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, dengan pekerjaan seadanya demi membutuhi kebutuhan sehari-hari demi keluarga. Dengan keuangan yang tidak seberapa ditambah harga karet tidak ada sebagaimana contoh seorang pengguris karet yang diperolehnya Rp 10.000 hingga Rp 30.000, mereka hidup dengan ke-empat atau ketiga anaknya yang masih usia sekolah. Untuk setiap anak usia sekolah membutuhkan keperluan uang untuk uang saku dan uang jajan dan kebutuhan lainya. Hal ini membuat keluarga miskin diharuskan berupaya optimal dalam mengelola keuangan agar kebutuhan dapat terbagi merata dengan baik.[71]

Berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Huta Holbung merupakan Desa yang ekonomi rendah disebabkan mereka hanya mengetahui keterampilan mengenai sektor pertanian saja, sehingga akses untuk mencari pekerjaan yang layak selain bertani mereka membutuhkan keterampilan lain serta mempunyai ijazah apabila hendak ingin melamar pekerjaan disebuah perusahaan ataupun di pabrik sekalipun.

[71] Irwan Masyarakat Desa Huta Holbung *Wawancara* Tanggal 14 Maret 2022.

Salah satu masalah utama terjadinya masyarakat miskin adalah ketidak berdayanya masyarakat menghadapi permasalah-permasalahan sosial ekonominya, disamping dia tidak memiliki keterampilan serta tidak memiliki pendidikan yang mapan akan hal bertani misalnya menyebabkan masih besarnya jumlah penduduk miskin dan banyaknya pengganggguran yang terjadi di sebuah masyarakat. Oleh sebab itu perlunya diadakan pembelajaran yang tentunya dilaksankan oleh pemerintah desa, beserta jajarannya, sehingga nantinya agar bisa menganggkat angka kemiskinan yang terjadi khusunya di Desa Huta Holbung.[72]

Melihat ketidak berdayanya masyarakat khususnya desa Huta Holbung dikarenakan desa Huta Holbung belum memiliki yang namanya BUMDES Desa, atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa, karena jika memiliki BUMDES desa dari laporan Kepala Desa, bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang bias mengasah kemampuan atau skil masyarakat, karna perbedaan APBD desa untuk itu tidak diperuntuk oleh Negara sebagai dana dalam memberikan pelatihan-pelatihan masyarakat, akan tetapi apabila sudah memiliki BUMDES desa tentunya bisa mengembangkan kemandirian desa melalui usaha-usaha mandiri dalam bentuk market, dalam arti BUMDES dijadikan sebagai ladang yang baru bagi masyarakat serta BUMDES desa menciptakan penyususan program-program yang bisa merubah kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.

[72]Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 11.45 WIB.

Salah satu dampak positif seandainya Desa Huta Holbung memiliki BUMDES Desa diantaranya:

1) Meingkatkan perekonomian Desa.
2) Meningkatkan pendapatan asli Desa.
3) Meningkatkan pengolahan potensi Desa dengan kebutuhan masyarakat.
4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan.[73]

Selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mengendalikan akan kondisi ekonomi, BUMDES juga merupakan kelembagaan perekonomian, serta mengangkat akan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber manusia sebagaimana yang termuat di dalam undang-undang desa pasal 87 ayat 1 tentang Desa.

Disamping harga karet yang tidak wajar menjadikan masyarakat Desa Huta Holbung tidak percaya diri ditambah Toke atau yang disebut pengumpul barang mentah hanya satu orang saja yang berada disana membuat patokan harga dari harga karet tersebut tidak berpariasi.[74] Maka dengan adanya BUMDES tadi beralih ke sektor ekonomi masyarakat bisa mengangkat kondisi ekonomi masyarakat walaupun tidak sepenuhnya.

Keadaan ekonomi yang paling parah lagi adalah masyarakat yang tidak mempunyai kebun hanya menggantungkan dirinya sebagai pekerja kasar, maksutnya orang-orang yang berpropesi sebagai bawahan pesuruh untuk mengguris kebun karet orang lain, dan hasilnya di bagi dua atau sesuai ketentuan seberapa banyak KiloGram pendapatan dalam jangka 5x dalam sepekan untuk mengguris maka hasil getah yang nantinya akan

[73] Undang-Undang RI No. Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 ayat 1.
[74] Taufik Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* Tanggal, 14 Maret 2022.

ditimbang pendapatan /Kg, dan hasilnya di bagi 2 kepada yang mempunyai kebun.[75] Begitulah kondisi ekonomi masyarakat Desa khususnya Huta Holbung, dalam artian masih jauh yang namanya ekonomi sejahtera.

Persentasi persenan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muara Tais Tapanuli Selatan[76]

Tabel, 4.3.
Catata Jenis Pekerjaan Desa HutaHolbung Berdasarkan Hasil Wawancara bersama Kepala Desa

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah %
1	Petani/Buruh/Pekebun	85%
2	Wiraswasta	14%
3	PNS	1%

Sumber: Data Berdasarkan Agrerat Pencacatan propesi Desa Huta Holbung Tahun 2022

Dari data di atas dapat dipahami bahwa persentase pekerjaan di Desa Huta Holbung yang dominan adalah di kalangang petani, buruh, pekebun, jika di kalkulasikan dengan propesi lainnya. Kalau dilihat lebih jauh mungkin ketidak adanya Pegawai Negeri Sipil di desa Huta Holbung menjadikan desa Huta Holbung masih jauh yang namanya pendidikan, atau malah sebaliknya orang-orang yang sudah tammat baik itu dari perguruan tinggi tidak mau tinggal atau menetap di desa khususnya desa Huta Holbung, maka mengakibatkan ketidak adanya pemberian masukan dari ataupun motipasi-motipasi yang bersifat membantu masyarakat mengenai keilmuan, karena orang-orang yang memiliki keilmuan juga memberikan efek positip terhadap dimana iya ditempatkan, dalam arti tidak mungkin

[75] Marwan Hasibuan Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* Tanggal, 14 maret 2022.
[76]Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 11.45 WIB.

hanya melihat warganya berkecimbung di satu tempat saja, dan pastinya sedikit banyaknya memberikan keilmuan baik di bidang-bidang lainnnya[77]

2. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Pemberdayaan Islam

a. Pemberdayaan Yang Dilakuakan Pemerintah Desa Huta Holbung

Berekaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan berbagai hal, salah satu contohnya ialah:

1) Mengalokasikan APBD desa jalan menuju perkebunan.

Maksut demikian pemerintah Desa selaku kepala Desa, beserta jajaran perangkat desa dan juga masyarakat melakukan Musrenbang, yakni musyawarah Rencana Pembangunan, maskutnya agenda yang dilakukan oleh aparatur desa beserta jajarannya dan juga masyarakat yang saling bertemu mendiskusikan apa saja keluhan yang terjadi di dalam masyarakat tentunya untuk mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat desa tersebut, serta memutuskan apa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang layak untuk di kerjakan lebih awal.[78]

Kegunaan jalan menuju ke ladang warga guna dalam pemberdayaan ekonomi adalah, yang awalnya masyarakat hanya berjalan kaki untuk berpergian ke Dolok sekarang mereka sudah bisa menggunakan sepeda motor, yang dulunya hanya memundak hasil

[77] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 11.50 WIB.

[78] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 12.00 WIB.

panennya dari dolok/kebun sekarang sudah bisa menggunakan hemat energi bahkan sampai sampai toke tidak perlu lagi menunggu di jalan raya akan tetapi langsung cek ke lokasi perkebunan untuk melihat hasil panen dari masyarakat itu sendiri.[79]

2) Mengalokasikan APBD desa untuk pembuatan sarana dan prasara

Penyediaan sarana dan prasara pemerintahan desa salah satunya mengalokasikan APBD desa untuk pembuatan pam air bersih guna agar masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan air bersih di berbagai rumah-rumah masyarakat. Dari penyediaan air bersih tersebut mereka menghemat biaya pemakaian listrik dari mesin dap air yang ada di rumah-rumah warga, intinya dengan adanya pam air bersih ini masyarakat lebih irit atas pemakain uang listrik tentunya membantu bagi masyarakat dalam mengedepankan pengeluaran yang lebih bermamfaat untuk keseharian mereka.[80]

Kegunaan air bersih sangat banyak mamfaatnya khususnya Desa Huta Holbung, dikarnakan Pam Air bersih ini memberikan sisi yang positif bagi yang mempergunakannya, salah satu contoh dalam hal keperluan sehari-hari masyarakat tidak lagi jauh-jauh untuk mendapatkan air bersih, Karena sudah ada tempat khusus, bagi yang

[79] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 12.20 WIB.

[80] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* APBD Desa 15 Maret 2022 pukul 12.30 WIB

memerlukan air bersih tersebut, bahkan sebagian tiap gang atau tempat nya masyarkat sudah ada tidak hanya satu tempat saja.[81]

3) Mangalokasikan APBD desa dalam pembuatan saluran irigasi air

Kegunakan saluran irigari air sangat besar efeknya justu malahan inilah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Huta Holbung dulu, karena saluran irigasi air ini yang nantinya akan mengalirkan air ke sawah-sawah masyarakat, peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan jalan yang mudah dalam menggairi sawah-sawah warga masyarakat Desa Huta Holbung, masyarakat yang awalnya masih menggunakan pompa untu mengairi sawahnya, sekarang semenjak sudah ada saluran irigasi yang di buat oleh pemerintah Desa berdasarkan aspirasi masyarakat nya juga, sekarang warga masyarakat menjadi semakin mudah dalam hal melaksanakan pekerjaan yang sulit sebelumnya sesudah adanya saluran irigasi air ini.[82]

4) Menyalurkan dana desa sesuai dengan keperluar dan inisiatif tertentu

Perubahan anggaran pendapatan belanjan desa tahun 2021 khusunya Desa Huta holbung, peran pemerintah desa dalam mengeluarkan anggaran pendapatan desa sudah sesuai dengan anggaran pendapatn belanja desa di tahun 2021 salah satunya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya ada karna PA

[81] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 12.30 WIB.

[82] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 12.40 WIB.

Desa belum ada hanya saja APBD desa hanya berpatok dari anggaran pemerintah untuk desa sebagai berikut:

a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
b) Bidang pelaksaaan pembangunan desa
c) Bidang pembinaan kemasyarakat desa
d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
e) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa[83]
f) Penyaluran pupuk bersupsidi dan pemberian bibit kepada masyarakat

Tambahan peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Huta Holbung salah satu pemberian pupuk yang sudah bersubsidi kepada masyarakat serta pemberian bibit kepada masyarakat desa yang nantinya ditanam di ladang atau perkebunan masyarakat. Pemberian ini secara keseluruhan petani-petani semua mendapat apa yang mereka inginkan khususnya Desa Hutan Holbung tampa terkecuali.[84]

b. Peran Pemerintah Desa Dalam Meingkatkan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Pemberdayaan Islam

Peran yang dilakukan Pemerintah Desa ditinjau dari perspektif pemberdayaan Islam. Secara keseluruhan warga Desa Huta Holbung

[83] Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (P-APDESA) Tahun Anggaran 2021 Desa Huta Holbung kecamatan Angkola Muaratais Kabuaten Tapanuli Selatan

[84] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 13.10 WIB.

100% adalah beragama Islam[85]. Oleh sebab itu peran pemerintah Desa khususnya ditijau dari perspektif pemberdayaan Islam, dalam hal ini ternyata di Desa Huta Holbung Dana Desa ternyata dialokasikan kepada anak Pesantren pertahunnya sekitar 30 juta rupiah.[86]. dan tambahan ternyata anak yatim yang sekolah di pesantren tersebut tidak perlu membayar uang sekolah untuk belajar di sana. Ini adalah inisiatif dari kepala Desa, Alim Ulama, beserta Hatobangon yang ada di sana, sesuai dengan firman Allah Swt, siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong nya.[87]

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahim antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada salah prinsif yaitu tolong menolonglah dalam hal kebaikan. Prinsipini merupakan yang paling mendasar.

Prinsip tolong menolong ini dinamakan prinsip ukhuwwah. Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak

---

[85] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 13.20 WIB.

[86] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 13.30 WIB.

[87] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa, 15 Maret 2022 pukul 13.40 WIB.

ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahim dalam masyarakat.[88]

Langkah yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif pemberdayaan Islam. Menurut kepala desa Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Masyarakat yang diberdayakan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat yang diberdayakan sepatutnya membentuk sendiri sebuah organisasi yang mengarahkan dan memandu jalannya pemberdayaan. Menyerahkan pelaksanaan pemberdayaan kepada pihak luar dapat menimbulkan ketergantungan dan justru mengganggu penanaman daya yang diinginkan, artinya mereka hanya terus menerus di lingkungan itu-itu saja tampa adanya dorongan serta masukan yang diberikan oleh pemerintah desa.[89]

Ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor naiknya taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis pembinaan dan pendidikan ketrampilan mutlak perlu dilakukan. Berdasarkan pendidikan dan pembinanaan terhadap masyarakat tentunya mengajak

---

[88] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa menurut perspektif pemberdayaan Islam 15 Maret 2022 pukul 13. 45 WIB.

[89] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa menurut perspektif pemberdayaan Islam 15 Maret 2022 pukul 13.50 WIB.

seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan skill dan ketrampilan sebagai langkah dalam meningkatkan taraf hidup. Hubungan pendidikan dan pemberdayaan dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab mereka yang akan datang, dengan memaknai belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama ,dan belajar menjadi seseorang agar menjadi lebih baik kedepannya.[90]

Menurut Sulistiyani sebagaimana penulis kutip dari jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No.1 (2019) hal 32-34 bahwa di jelaskan pada tahapan pemberdayaan yang harus didahulukan sebagai berikut yaitu:

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2) Tahap transformasi pengetahuan agar terbuka wawasan berpikir dan memberikan kecakapan dan ketrampilan dasar agar bisa mengambil peran dalam kegiatan pembangunan.
3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan ketrampilan sehingga terciptalah inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi yang mengantarkan pada kemandirian.[91]

[90] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa menurut perspektif pemberdayaan Islam 15 Maret 2022 pukul 14.00 WIB.

[91] Dikutip dari Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No.1 (2019) hal 32-34.

Setelah terbentuk karakter yang positif, hal berikutnya adalah pemberian ketrampilan dan skill, serta penanaman inisiatif dan kemampuan untuk berinovasi. Dalam Al Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Islam karena Islam itu sendiri adalah sebagai cover dalam terciptanya pembedayaan ekonomi masyarakat Islam. Al Quran juga menawarkan solusi nyata yang bisa diaplikasikan dalam membantu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Ada tiga prinsip pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al Quran. Yang paling utama tadi adalah prinsip ukhuwwah. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain, dalam kerangka ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyyah. [92]

Tujuan peran pemerintah Desa dalam meingkatkan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif Islam dalam Islam peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat bertujuan untuk menciptakan tidak lain yaitu untuk kesejahteraan masyarakat desa,[93] khususnya dalam bidang ekonomi.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di dunia. Untuk tercapainya kemaslahatan setiap manusia serta pembemberdayaan dalam bidang ekonomi mesti memiliki keinginan untuk mengubah perekonomian mereka ke arah yang lebih

[92] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa menurut perspektif pemberdayaan Islam 15 Maret 2022 pukul 14.10 WIB.

[93] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa menurut perspektif pemberdayaan Islam 15 Maret 2022 pukul 14.20 WIB.

baik, di samping itu pemerintah desa yang memberikan kontribusi kepada masyarakat, digaris bawahi masyarakat juga dapat menerima apa yang menjadi masukan serta arahan yang diberikan pemerintah Desa kepada masyarakat agar tercapinya keinginan yang selama ini di cita-citakan.

Jika hal diatas tercapai maka, maka peran pemerintah berpokus kepada kekuatan akan potensi yang lebih individu, sehingga akan tercapinya kepada sosial yang baik dan perekonomian masyakat yang lebih baik. Dalam pandangan Islam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor ekonomi dilakukan untuk merealisasikan serta mengingkan yang namanya kebahagiaan di dunia serta kebahagian di akhirat[94]

Terakhir peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif Islam adalah membentuk karakter untuk selalu positif adalah kunci keberhasilan proses pemberdayaan terhadap masyarakat harus disadarkan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk berusaha mencari rizki Allah yang tersebar di muka bumi Allah telah menjamin rizki setiap makhluknya, jika mereka berusaha dan bertawakkal. Begitulah didikan dan arahan Rasulullah SAW untuk menjadikan umat Islam sebagai insaninsan yang terhormat dan terpandang, bukan umat yang lemah dan pemalas.

[94] Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Peran Pemerintah Desa menurut perspektif pemberdayaan Islam 15 Maret 2022 pukul 14.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan menghimpun data lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sepenuhnya sudah sesuai menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 namun beberapa program yang sudah dirumuskan belum semaksimal mungkin diantaranya:

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Huta Holbung sebagai berikut:

1) Kondisi ekonomi masyarakat Huta Holbung masih di bawah rata-rata, karena masih kurangnya pasilitas dalam arti mendongkrak ekonomi masyarakat desa khususnya Desa Huta Holbung.
2) Pendapatan rata-rata petani desa huta holbung hanya bergantung di sektor petani karet saja, yakni rata-rata pekerjaan masyarakat hanya bergantung di ladang karet saja.
3) Kondisi ekonomi masyarakat desa Huta Holbung bermata pencarian sebagai petani karet, pendapatan rata-rata perminggunya kalau di kalikan berdasarkan pendapatan dari menderes karet berkisar 200 ribu rupiah/ minggunya masih pendapatan masih jauh di bawah rata pendapatan pada umumnya.
4) Kondisi ekonomi masyarakat kurang baik dalam artian belum ada yang menangani hasil-hasil bumi dengan baik di tempat tersebut, dikarenakan

hanya seorang saja yang menjadi Toke/Tengkulak karet maka perbandingan harga tidak ada di daerah tersebut.

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Huta Holbung antara lain:

Peran pemerintah Desa dalam Meingkatkan Ekonomi Masyarakat telah dijalankan dengan baik, yang dibuktikan juga dengan terlaksananya program-program yang menghasilkan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dengan matang dan dimusyawarahkan sebagai berikut:

1. Pembuatan jalan ke ladang kebun masyarakat
2. Pembangunan infrastruktur sebagai meringgankan beban masyarakat desa yaitu pembuatan pam air bersih
3. Selanjutnya pembuatan drenasi air untuk mengalirkan air ke ladang-ladang warga masyarakat desa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Pemerintah desa melalui pengembangan ekonomi semestinya meprioritaskan pembangunan SDM desa terutama kaum muda desa sebagai generasi yang akan membangun desa dimasa depan, dan beberapa saran penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat

   Masyarakat berusaha agar memberikan pupuk yang baik dan sehat terhadap lading karet masyarakat agar masyarakat dapat memiliki hasil yang banyak khususnya petani karet.

2. Kepada Pemerintah Desa

Pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Huta Holbung semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa lebih berdaya dalam hal tatanan sosial dan ekonomi yang bersifat produktif, bukan hanya menerima bantuan bantuan dari pemerintah pusat, dan tambahan khusunya kepada Desa Huta Holbung agar secepatnya di urus BUMDES desa agar nantinya kegiatan-kegiatan yang bersifat pruduktipitas desa dapat terlaksanakan dan hasil dari produksi tersebut kembali ke tangan masyarakat desa, agar nantinya masyarakat desa khusunya Desa Huta Holung lebih memiliki Skil daripada hanya menerima pemberian dari pemerintah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pusataka Setia, 2009)

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015)

Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraaan dan Model-Model Pemberdayaan.*(Jogjakarta: Gava Media, 2004)

Anton Putra Bungsu Harahap, kepala Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli selatan, *Wawancara* tentang peran pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, di Desa Huta Holbung.

Budiman Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* di Desa Huta Holbung.

Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (PT Syamil Cipta Media, Bandung, 2005)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Dikutip dari Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No.1 (2019)

Dinas *Kependudukan* dan Pencatatan Sipil, *Data Agregat Kependudukan Huta Holbung Kecamatan Angkola MuaraTais* , Kabupaten Tapanuli Selatan, 2022.

Ichwansyah Tampubolon, *Metodologi Studi Keislaman,* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018)

Irwan Masyarakat Desa Huta Holbung *Wawancara* di Desa Huta Holbung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013)

Marwan Hasibuan Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* di Desa Huta Holbung.

Mutthoriq dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, (JurnalAdministrasi Publik, Volume 2, No 3, IAIN Lampung)

Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina,2008)

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Observasi, Letak Geografis Desa Huta Holbung, 15 Maret 2022 pukul 10.10 WIB.

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (P-APDESA) Tahun Anggaran 2021 Desa Huta Holbung kecamatan Angkola Muaratais Kabuaten Tapanuli Selatan

Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Prekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997)

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Saifuddin Yunus dkk, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Banda: Aceh: Bandar Publishing, 2017)

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

Sri Handini, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Msc, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Syaron dkk, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,* Jurnal Administrasi Publik, Volume. 04. Nomor. 048 (diakses pada 8 Maret 2022 pukul 21.02 WIB)

Syaron M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota dan Desa* , Jurnal Adminitstrasi Publik. Volume. 04, No. 048.

Taufik Masyarakat Desa Huta Holbung, *wawancara* Tanggal di Desa Huta Holbung.

Titis Istikomah, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Enterpreneurship Capacity Building, Dalam Perspetif Ekonomi Islam*", (Jurnal Adminitstrasi Publik. Volume. 05, No. 090 IAIN Lampung)

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik,* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Ulfi Putra Sany, *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 IAIN Salatiga)

Undang-Undang Tahun 2014 *Tentang Desa*

Undang-Undang Tahun 2005 *Tentang Pemerintahan Desa*,.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, cet VIII,1996)

Wardi Bachtiar, *Metodologi Peneitian Ilmu Dakwah*. Cet ke 1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)

Yasmin Harahap, Kepala Seksi Kemasyarakatan desa Huta Holbung, *Wawancara* Tentang Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa, 15 Maret 2022 pukul 10:00 WIB.

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2014)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Ahmad Kholil Lubis
NIM	: 15 303 00003
Tempat/Tgl. Lahir	: Padangsidimpuan, 3 Mei 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
No.Hp	: 082297619788
e-Mail	: Ahmadkholil530@gmail.com
Alamat Lengkap	: Jln. Imam Bonjol Aek Tampang Gg. Pendidikan

B. Identitas Orangtua

Ayah	: Imran Basir Lubis
Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Nur Hasanah Pulungan
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Lengkap	: Jln. Imam Bonjol Aek Tampang Gg. Pendidikan

C. Riwayat Pendidikan

Tahun 2008, Tamat dari SD 13 Aek Tampang 200205

Tahun 2012, Tamat dari MTs Pondok Pesantrean Darul Ikhlas Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan

Tahun 2015, Tamat dari MAS Darul Ikhlas Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan

Tahun 2015, Masuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI PENELITIAN

Anton Putra Bungsu Harahap, Kepala Desa Huta Holbung Wawancara 15 Maret 2022

SAHRUL HARAHAP Sekretaris Desa Wawancara 15 Maret 2022

BERSAMA SAHRUL HARAHAH Sekretaris Desa Huta Holbung Dan Salah Satu Masyarakat Desa Huta Holbung Taufik Nasution Wawancara 15 MAret 2022

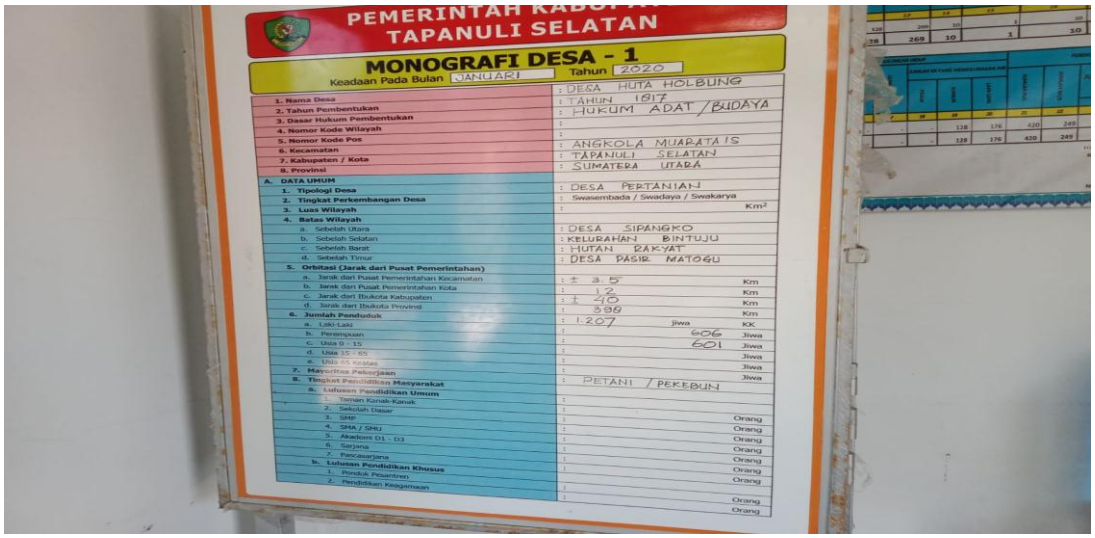

MONOGRAFI DESA HUTA HOLBUNG

JAJARAN PEMERINTAHAN DESA HUTA HOLBUNG Kecamatan Angkola Muaratis

Anggaran APND Desa Huta Holbung Kecamatan Angkkola Muaratais

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 204 /In.14/F.4c/PP.00.9/02/2022 — 7 Februari 2022
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : ***Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi***

Yth. Kepada Bapak Kepala Desa Huta Holbung Kec. Angkola Muaratais Kab. Tap. Sel

Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama	:	Ahmad Kholil Lubis
NIM	:	1530300003
Fakultas/Jurusan	:	Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ PMI
Alamat	:	Jl. Imam Bonjol Gg. Pendidikan Aek Tampang Padangsidimpuan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul " **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTA HOLBUNG MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN)** "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan kepada Bapak Kepada Desa untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 196209261993031001

PEMRINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS

DESA HUTA HOLBUNG

Nomor : 141/031/KD / III / 2022
Sifat :
Lamp :

Hal : Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian

Huta Holbung 15 Maret 2022
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi/ PMI
PMI
Di-
Padangsidmpuan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Padangsidimpuan Nomor : 204 /IN. 14 /F.4c/PP.00.9/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN ISLAM (STUDI KASUS DI DESA HUTA HOLBUNG ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN) "**

atas nama

Nama	: Ahmad Kholil Lubis
NIM	: 1530300003
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/PMI
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Alamat	: Padangsidimpuan

Surat ini diberika kepada yang namanya tersebut diatas sebagai bukti telah melakukan penelitian di Desa Huta Holbung.

Demikian surat ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Kepala Desa Huta Holbung

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DESA HUTA HOLBUNG
KEC. ANGKOLA MUARATAIS

ANTON PUTRA BUNGSU HARAHAP